

PERAN MAHASISWA MAGANG DALAM OPTIMALISASI ADMINISTRASI PAJAK BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) KAB. SIDENRENG RAPPANG

*The Role Of Internship Students In Optimizing Tax Administration At The Regional
Revenue Agency (Bapenda) Of Sidenreng Rappang Regency*

Nabila¹, Ismayanti Idris², Nur Hidayat Yusuf³, Dayu Suhardi⁴

Email: nabilabaharuddin17@gmail.com¹, ismayantiidris5@gmail.com², nurhidayat Yusuf03@gmail.com³,
camarbiru80@gmail.com⁴

^{1,2,3}Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Parepare

⁴Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah
Parepare

Jl. Jend. Ahmad Yani No. Km.6, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91131

Abstrak

Artikel ini membahas peran mahasiswa magang dalam mendukung optimalisasi administrasi pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Sidenreng Rappang. Topik ini penting karena efektivitas administrasi perpajakan berkontribusi langsung terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta kualitas pelayanan publik. Kegiatan magang ini dilaksanakan berdasarkan pengalaman tiga mahasiswa Program Studi Manajemen Keuangan Universitas Muhammadiyah Parepare yang terlibat secara langsung dalam kegiatan operasional BAPENDA Sidrap melalui program magang dalam skema Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Metode pelaksanaan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi lapangan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa mahasiswa berperan dalam pengarsipan dokumen, input data administrasi perpajakan, penyusunan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), serta pelayanan publik kepada wajib pajak. Keterlibatan mahasiswa tidak hanya meningkatkan efisiensi proses administrasi, tetapi juga memberikan manfaat dalam pengembangan kompetensi profesional seperti keterampilan komunikasi, disiplin kerja, kerja sama tim, dan pemahaman prosedur administrasi fiskal. Selain itu, kolaborasi antara perguruan tinggi dan instansi pemerintah terbukti menjadi langkah strategis dalam penguatan kualitas tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, sekaligus menjadi wujud pelaksanaan tridharma perguruan tinggi khususnya pada bidang pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, hasil kegiatan magang ini menunjukkan bahwa program magang memberikan kontribusi nyata bagi optimalisasi administrasi pajak daerah dan peningkatan kinerja pelayanan publik di BAPENDA Sidrap.

Kata Kunci : Administrasi Pajak Daerah, Pelayanan Publik, Pendapatan Asli Daerah, BAPENDA Sidrap.

Abstract

This article discusses the role of internship students in supporting the optimization of regional tax administration at the Regional Revenue Agency (BAPENDA) of Sidenreng Rappang Regency. The topic is essential because the effectiveness of tax administration contributes directly to the enhancement of Regional Original Revenue (PAD) and the improvement of public service quality. This community service activity is based on the experiences of three students from the Financial Management Study Program at Universitas Muhammadiyah Parepare who were directly involved in the operational activities of BAPENDA Sidrap during the internship program of the Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) scheme. The implementation method used is a descriptive qualitative approach, with data collected through direct observation, in-depth interviews, and field documentation. The results indicate that students played important roles in document archiving, tax administration data entry, preparation of Regional Tax Assessment Letters (SKPD), and providing public services to taxpayers. Their involvement not only improved the efficiency of administrative processes but also contributed significantly to the development of professional competencies, including communication skills, work discipline, teamwork, and understanding

of fiscal administrative procedures. Furthermore, the collaboration between higher education institutions and government agencies serves as a strategic effort to strengthen transparent and accountable regional financial governance, while also embodying the tridharma of higher education, particularly in the dimension of community service. Therefore, the results of this internship activity indicate that internship programs provide substantial contributions to the optimization of regional tax administration and the enhancement of public service performance at BAPENDA Sidrap.

Keywords : Regional Tax Administration, Public Service, Regional Original Revenue, BAPENDA Sidrap.

PENDAHULUAN

Administrasi pajak daerah merupakan salah satu komponen penting dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). PAD memiliki peran strategis dalam mendukung kemandirian fiskal daerah, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai instrumen utama penguatan kapasitas keuangan pemerintah kabupaten/kota. Optimalisasi pengelolaan pajak daerah tidak hanya bergantung pada regulasi fiskal, tetapi juga pada efektivitas sistem administrasi yang diterapkan oleh instansi pemerintah, khususnya Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) (Kementerian Keuangan, 2020). Dalam konteks tersebut, keberadaan sumber daya manusia yang kompeten menjadi faktor penentu dalam memastikan tercapainya tata kelola perpajakan yang efisien, transparan, dan akuntabel (Mardiasmo, 2019).

Pelaksanaan otonomi daerah menempatkan pemerintah kabupaten/kota pada posisi yang menuntut kemampuan menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah secara optimal. Menurut Siahaan (2016), pajak daerah menjadi tulang punggung penerimaan asli daerah karena sifatnya yang relatif stabil dan dapat dikelola secara langsung oleh pemerintah daerah. Halim dan Kusufi (2016) juga menekankan bahwa efektivitas pengelolaan pajak daerah sangat ditentukan oleh kualitas administrasi fiskal, sistem informasi yang memadai, serta kompetensi aparatur pelaksana. Oleh karena itu, penguatan aspek administratif menjadi prasyarat penting untuk mendorong peningkatan realisasi PAD secara berkelanjutan.

Salah satu upaya strategis untuk mendukung kebutuhan penguatan kapasitas administrasi tersebut adalah melalui program magang mahasiswa yang memungkinkan keterlibatan langsung dalam proses administrasi perpajakan. Program ini sejalan dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang mendorong mahasiswa untuk memperoleh pengalaman praktis di luar kampus, termasuk di instansi pemerintah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020). Kebijakan tersebut juga merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menetapkan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu pilar tridharma perguruan tinggi.

Pelaksanaan magang oleh mahasiswa tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembelajaran praktis, tetapi juga dapat membantu instansi dalam menjalankan tugas operasional, seperti pengarsipan dokumen, penginputan data pajak, penyusunan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), serta pelayanan kepada wajib pajak. Namun demikian, masih terdapat beberapa isu yang muncul dalam proses administrasi pajak daerah, di antaranya keterbatasan sumber daya manusia, beban administrasi yang tinggi, serta kebutuhan peningkatan kapasitas digital dalam mendukung sistem informasi perpajakan (Rahayu, 2020). Kehadiran mahasiswa magang diharapkan dapat membantu mengatasi sebagian dari tantangan tersebut, sekaligus memberikan pengalaman lapangan yang relevan bagi pengembangan kompetensi profesional mereka.

Sejumlah kajian terdahulu menunjukkan bahwa program magang memiliki peran positif dalam meningkatkan kapasitas administrasi instansi pemerintah. Widiastuti (2021) menyatakan bahwa keterlibatan mahasiswa magang dapat mendukung efektivitas pelayanan publik melalui kontribusi dalam administrasi teknis dan pelayanan warga. Sejalan dengan hal tersebut, Ramadhan (2020) menekankan bahwa magang mampu meningkatkan kualitas tata kelola dokumen perpajakan dan mempercepat proses pelayanan fiskal. Sementara itu, Nurhayati dan Sari (2022) menemukan bahwa program magang berkontribusi pada peningkatan kompetensi mahasiswa, terutama dalam keterampilan administratif, komunikasi, dan pemahaman prosedur organisasi. Temuan-temuan tersebut menegaskan bahwa program magang memiliki nilai strategis, baik bagi mahasiswa sebagai pembelajar maupun bagi instansi sebagai mitra penyelenggara.

BAPENDA Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga membutuhkan dukungan administratif yang konsisten dan berkelanjutan. Sebagai daerah dengan potensi ekonomi berbasis pertanian, perdagangan, dan jasa, Sidrap memiliki basis wajib pajak yang cukup beragam sehingga menuntut sistem administrasi yang responsif. Kondisi ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi mahasiswa magang untuk berkontribusi secara nyata dalam proses pelayanan dan pengelolaan data perpajakan daerah.

Identifikasi masalah dalam kegiatan magang ini berangkat dari fenomena yang diamati selama pelaksanaan magang pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Sidenreng Rappang. Berdasarkan pengalaman lapangan tiga mahasiswa magang, ditemukan bahwa proses administrasi pajak daerah masih menghadapi sejumlah kendala operasional yang berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan publik dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu hambatan utama, karena jumlah pegawai yang menangani administrasi perpajakan tidak sebanding dengan volume pekerjaan, terutama pada kegiatan pengarsipan dokumen, penyusunan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), dan input data wajib pajak (Mardiasmo, 2019). Kondisi tersebut menyebabkan beberapa pekerjaan administratif menumpuk dan memerlukan waktu tambahan untuk penyelesaiannya.

Pengelolaan dokumen perpajakan juga belum sepenuhnya optimal, ditandai dengan masih ditemukannya arsip yang tidak tertata dengan baik sehingga memperlambat proses pencarian data. Sistem pengarsipan yang belum terstandarisasi menjadi hambatan tersendiri dalam menjaga keakuratan dan ketertelusuran data wajib pajak (Halim & Kusufi, 2016). Selain itu, pemanfaatan sistem informasi perpajakan belum maksimal, mengingat proses digitalisasi membutuhkan ketelitian tinggi dan masih rentan terjadi kesalahan input maupun keterlambatan pembaruan data. Rahayu (2020) menegaskan bahwa keberhasilan administrasi perpajakan modern sangat bergantung pada integrasi sistem informasi yang andal serta kompetensi digital aparaturnya.

Kualitas pelayanan publik kepada wajib pajak juga perlu terus ditingkatkan, terutama dalam hal kecepatan pelayanan, penyampaian informasi, dan pendampingan administrasi. Wajib pajak yang datang ke BAPENDA umumnya memerlukan penjelasan mengenai prosedur pembayaran, jenis-jenis pajak daerah, serta cara pengisian formulir yang benar. Ketidadaan pendampingan yang memadai dapat menyebabkan keterlambatan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, yang pada gilirannya berdampak pada realisasi PAD (Siahaan, 2016). Fenomena tersebut diperparah oleh adanya kesenjangan antara teori akademik yang dipelajari mahasiswa dan praktik administrasi fiskal di lapangan, sehingga mahasiswa membutuhkan proses adaptasi sebelum mampu memberikan kontribusi optimal.

Integrasi antara pelayanan manual dan digital juga belum berjalan efektif sehingga menyebabkan beberapa proses kerja dilakukan secara berulang dan tidak efisien. Ketidakteraturan antara data manual pada berkas fisik dan data digital dalam sistem informasi menjadi sumber inefisiensi yang harus segera diatasi. Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, kegiatan magang ini penting untuk mengidentifikasi bagaimana peran mahasiswa magang dapat membantu mengurangi beban administrasi, meningkatkan efektivitas pelayanan, serta mendukung optimalisasi administrasi pajak daerah di BAPENDA Sidrap.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan magang ini penting dilaksanakan untuk menganalisis bagaimana peran mahasiswa magang dapat mendukung optimalisasi administrasi pajak daerah di BAPENDA Kabupaten Sidenreng Rappang. Selain memberikan gambaran kontribusi nyata mahasiswa dalam proses administrasi perpajakan, artikel ini juga menyoroti pentingnya kerja sama antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional sebagai bentuk implementasi tridharma perguruan tinggi khususnya pada aspek pengabdian kepada masyarakat.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan magang ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peran mahasiswa magang dalam mendukung optimalisasi administrasi pajak daerah di BAPENDA Sidrap. Kegiatan dilaksanakan di kantor BAPENDA Kabupaten Sidenreng Rappang dengan melibatkan tiga orang mahasiswa Program Studi Manajemen Keuangan Universitas Muhammadiyah Parepare yang ditempatkan pada bidang administrasi perpajakan dan pelayanan wajib pajak. Selama masa magang, mahasiswa bekerja mengikuti jam kerja

resmi instansi di bawah bimbingan pegawai BAPENDA sebagai pembimbing lapangan serta dosen pembimbing dari fakultas.

Pelaksanaan kegiatan magang dibagi ke dalam tiga tahapan utama, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Tahap persiapan mencakup pengurusan administrasi magang, penyerahan mahasiswa oleh fakultas kepada BAPENDA, serta pemberian orientasi awal yang komprehensif mengenai prosedur administrasi perpajakan, penggunaan sistem informasi, dan tata kerja yang berlaku di lingkungan BAPENDA. Tahap pelaksanaan merupakan inti kegiatan, di mana mahasiswa aktif terlibat dalam berbagai kegiatan seperti pengarsipan dokumen, pengolahan data, penyusunan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), dan pelayanan kepada wajib pajak. Tahap evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan magang melalui penilaian pembimbing lapangan, penyusunan laporan akhir, dan refleksi bersama antara mahasiswa dan dosen pembimbing.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik, yaitu observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memantau kegiatan mahasiswa secara langsung, seperti pengarsipan dokumen, input data, serta pelayanan kepada wajib pajak. Wawancara dilakukan terhadap mahasiswa peserta magang, pegawai BAPENDA, dan pihak terkait lainnya untuk memahami kontribusi dan pengalaman selama pelaksanaan magang. Selain itu, dokumentasi berupa laporan kerja, surat ketetapan pajak, dan dokumen administrasi terkait digunakan sebagai sumber data pendukung. Kombinasi ketiga teknik ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai proses dan hasil kegiatan.

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif untuk menilai kontribusi dan dampaknya terhadap efisiensi dan efektivitas administrasi serta pelayanan publik di BAPENDA Sidrap. Analisis dilakukan dengan menelaah pola aktivitas mahasiswa, mengidentifikasi kendala yang muncul, serta menghubungkannya dengan kerangka konseptual mengenai administrasi pajak daerah dan pelayanan publik. Hasil analisis ini digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan program magang di masa mendatang, baik bagi mahasiswa, perguruan tinggi, maupun BAPENDA sebagai instansi mitra.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alternatif pemecahan masalah dalam kegiatan magang ini dirumuskan berdasarkan berbagai kendala yang teridentifikasi selama pelaksanaan program magang di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Sidenreng Rappang. Mengacu pada pandangan Polya (1973) bahwa pemecahan masalah merupakan upaya sistematis untuk menemukan solusi atas kesulitan tertentu, serta pendapat Goldstein dan Levin (2019) yang menekankan bahwa pemecahan masalah merupakan proses kognitif tingkat tinggi yang menuntut pengendalian dan pengaturan lebih dari keterampilan dasar, maka solusi yang dikembangkan harus bersifat terencana, komprehensif, dan sesuai dengan kebutuhan institusional.

Salah satu alternatif pemecahan masalah adalah meningkatkan efektivitas pengelolaan administrasi perpajakan melalui penataan kembali sistem pengarsipan dokumen agar lebih terstruktur, terorganisasi, dan mudah diakses. Perbaikan ini dapat dilaksanakan melalui penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih jelas serta optimalisasi penggunaan sistem digital berbasis data untuk mengurangi risiko kesalahan, kehilangan dokumen, maupun penumpukan arsip (Kementerian Keuangan, 2020). Selain itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, baik pegawai maupun mahasiswa magang, perlu dilakukan melalui pelatihan terkait pengelolaan dokumen, penggunaan aplikasi administrasi perpajakan, dan teknik pelayanan publik yang baik sehingga pelaksanaan tugas, seperti input data dan penyusunan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), dapat dilakukan dengan lebih cepat, tepat, dan efisien (Nurhayati & Sari, 2022).

Penguatan infrastruktur teknologi informasi juga menjadi langkah penting, terutama dalam mengoptimalkan sistem informasi perpajakan serta meningkatkan integrasi antara proses manual dan digital. Rahayu (2020) menekankan bahwa transformasi digital dalam administrasi perpajakan memerlukan kesiapan sistem sekaligus kesiapan sumber daya manusia. Langkah ini bertujuan meminimalkan duplikasi pekerjaan dan mempercepat alur layanan (Ramadhan, 2020). Selain itu, pengaturan pembagian tugas yang lebih proporsional atau penambahan jumlah tenaga administrasi dapat membantu mengurangi beban kerja yang tinggi. Bagi mahasiswa magang, pelaksanaan orientasi awal yang lebih komprehensif mengenai prosedur administrasi pajak dapat membantu mengurangi kesenjangan antara teori akademik dan praktik lapangan (Widiastuti, 2021).

Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada wajib pajak juga perlu menjadi prioritas. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan informasi yang jelas mengenai jenis-jenis pajak daerah, prosedur pembayaran, dan sanksi atas keterlambatan (Siahaan, 2016). Peran mahasiswa magang dalam hal ini dapat diarahkan untuk membantu menyusun materi edukasi wajib pajak, mendampingi pengisian formulir, serta memberikan penjelasan dasar kepada masyarakat yang datang ke kantor BAPENDA. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya melaksanakan tugas administratif, tetapi juga terlibat dalam fungsi edukasi publik yang selaras dengan semangat pengabdian kepada masyarakat.

Penguatan kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah menjadi solusi berkelanjutan yang perlu diinstitusionalisasikan. Halim dan Kusufi (2016) menyatakan bahwa kemitraan strategis antara akademisi dan praktisi mampu menghasilkan inovasi dalam tata kelola keuangan daerah. Kerja sama tersebut dapat diperkuat melalui penyusunan nota kesepahaman (MoU) yang mengatur skema magang, riset kolaboratif, serta pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020). Model kolaborasi seperti ini juga membuka peluang bagi BAPENDA untuk memperoleh masukan akademik dalam rangka penyempurnaan sistem administrasi perpajakannya.

Dengan demikian, alternatif pemecahan masalah yang dikemukakan dalam kegiatan magang ini bersifat multidimensi, mencakup aspek sumber daya manusia, sistem dan prosedur, teknologi informasi, pelayanan publik, serta kelembagaan. Kombinasi solusi-solusi tersebut diharapkan mampu mendukung peningkatan efektivitas administrasi perpajakan serta memperkuat kualitas pelayanan publik di BAPENDA Kabupaten Sidenreng Rappang secara berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan program magang di BAPENDA Kabupaten Sidenreng Rappang, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa magang berperan signifikan dalam mendukung optimalisasi administrasi pajak daerah melalui kegiatan pengarsipan dokumen, pengolahan dan penginputan data perpajakan, penyusunan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), serta pelayanan informasi kepada wajib pajak. Kontribusi tersebut turut meningkatkan kelancaran alur kerja administratif dan membantu meringankan beban tugas pegawai, sekaligus memberikan pengalaman praktis yang memperkuat kompetensi profesional mahasiswa, khususnya dalam aspek kedisiplinan, komunikasi, kerja sama tim, dan pemahaman prosedur administrasi fiskal. Kegiatan magang ini juga menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dapat memperkuat kualitas tata kelola keuangan daerah sekaligus mewujudkan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di bidang pengabdian kepada masyarakat.

Saran

Berdasarkan hasil kegiatan magang, disarankan agar BAPENDA Kabupaten Sidenreng Rappang menyusun standar operasional prosedur (SOP) magang yang lebih terstruktur, memperkuat sistem informasi perpajakan, serta meningkatkan integrasi antara pelayanan manual dan digital untuk mendukung efektivitas administrasi. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare, disarankan untuk memperluas kemitraan strategis dengan instansi pemerintah daerah lainnya sebagai wadah pelaksanaan program MBKM dan pengabdian kepada masyarakat, serta memperkuat pembekalan mahasiswa sebelum penerjunan ke lapangan.

Bagi mahasiswa, disarankan agar mempersiapkan diri secara akademik maupun mental sebelum mengikuti kegiatan magang, memperkuat pemahaman terhadap regulasi perpajakan daerah, serta menjaga sikap profesional selama berada di lingkungan kerja. Sementara itu, bagi kegiatan magang selanjutnya, disarankan agar memperluas cakupan kajian dengan melibatkan jumlah peserta magang yang lebih beragam atau melakukan studi perbandingan antardaerah, serta mempertimbangkan penggunaan pendekatan kuantitatif untuk memperoleh gambaran yang lebih terukur mengenai efektivitas kontribusi mahasiswa terhadap tata kelola perpajakan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

DAFTAR PUSTAKA

Bastian, I. (2010). Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar (Edisi 3). Erlangga.

- Dwiyanto, A. (2015). *Manajemen pelayanan publik: Peduli, inklusif, dan kolaboratif* (Edisi 3). Gadjah Mada University Press.
- Goldstein, E. B., & Levin, D. T. (2019). *Cognitive psychology: Connecting mind, research, and everyday experience* (5th ed.). Cengage Learning.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2016). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah* (Edisi 4). Salemba Empat.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman umum administrasi perpajakan daerah*. Direktorat Jenderal Pajak.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Buku panduan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (Edisi Terbaru). Penerbit Andi.
- Nurhayati, S., & Sari, R. P. (2022). Pengaruh program magang terhadap peningkatan kompetensi mahasiswa: Studi pada administrasi publik. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 19(2), 145–156.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
- Polya, G. (1973). *How to solve it: A new aspect of mathematical method* (2nd ed.). Princeton University Press.
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan: Konsep, sistem, dan implementasi*. Rekayasa Sains.
- Ramadhan, A. (2020). Efektivitas pengelolaan dokumen perpajakan dalam meningkatkan pelayanan fiskal. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 15(1), 34–42.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan kasus* (Edisi 11). Salemba Empat.
- Sedarmayanti. (2018). *Sumber daya manusia dan produktivitas kerja*. Mandar Maju.
- Siahaan, M. P. (2016). *Pajak daerah dan retribusi daerah* (Edisi Revisi). RajaGrafindo Persada.
- Sujarweni, V. W. (2019). *Akuntansi sektor publik: Teori, konsep, dan aplikasi*. Pustaka Baru Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia* (Edisi 12). Salemba Empat.
- Widiastuti, N. (2021). Program magang sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah. *Jurnal Manajemen dan Pelayanan Publik*, 9(3), 201–210.